

## **Analisis Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE di Provinsi Papua Tengah**

**Yenni Selina Wambukomo<sup>1\*</sup>, Baharuddin<sup>2</sup>, Kristian H.P. Lambe<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: [yenniselina@gmail.com](mailto:yenniselina@gmail.com)<sup>1</sup>

\*Penulis korespondensi

### **Abstrak**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diharapkan mampu menjawab tuntutan tersebut, namun efektivitasnya di daerah otonom baru masih perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa melalui SPSE di Provinsi Papua Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, termasuk peran pemantauan dan evaluasi pengadaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam terhadap lima informan kunci pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPSE telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menghasilkan efisiensi anggaran pada sebagian paket pengadaan, yang tercermin dari selisih antara Harga Perkiraan Sendiri dan nilai kontrak. Namun, efisiensi tersebut belum optimal dan belum merata. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kendala infrastruktur teknologi informasi, kualitas perencanaan pengadaan yang belum optimal, serta pemanfaatan data SPSE yang masih terbatas dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas SPSE dalam mendorong efisiensi anggaran sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas aparatur, dan orientasi pengawasan berbasis kinerja.

**Kata kunci:** efisiensi anggaran; pengadaan barang dan jasa; SPSE; manajemen keuangan daerah; Papua Tengah.

### **Abstract**

*Government procurement of goods and services represents a strategic component of regional financial management that directly influences budget efficiency, transparency, and public service quality. The implementation of the Electronic Procurement System (SPSE) is expected to enhance these principles; however, its effectiveness in newly established autonomous regions remains underexplored. This study aims to examine the efficiency of procurement budgets implemented through SPSE in Central Papua Province and to identify key factors influencing such efficiency, including the role of procurement monitoring and evaluation. A qualitative descriptive approach was employed, using data collected through field observations, in-depth interviews with five key informants from the Regional Secretariat's Procurement Bureau, and document analysis. The findings indicate that SPSE implementation has contributed positively to transparency and accountability and has generated budget efficiency in several procurement packages, as reflected by differences between the Owner's Estimate and contract values. Nevertheless, efficiency has not been optimally or evenly achieved across all procurement activities. Major constraints include limited human resource competence, inadequate information technology infrastructure, suboptimal procurement planning, and underutilization of SPSE data for performance-based monitoring and evaluation. The study concludes that the effectiveness of SPSE in improving procurement budget efficiency depends not merely on system availability, but also on institutional readiness, personnel capacity, and a governance framework that emphasizes data-driven evaluation and performance orientation.*

**Keywords:** budget efficiency; public procurement; SPSE; regional financial management; Central Papua Province.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu komponen terbesar dalam anggaran publik yang memiliki dampak langsung pada efektivitas belanja negara dan kualitas layanan publik. Sistem pengadaan yang tradisional sering dikaitkan dengan isu inefisiensi anggaran, lemahnya transparansi, dan tingginya risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (Kholiq, 2025; Suri & Dharmawan, 2023). Di Indonesia, untuk menjawab berbagai masalah tersebut, pemerintah mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai bentuk digitalisasi proses pengadaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Henda *et al.*, 2025).

Dalam konteks global, penggunaan e-procurement di banyak negara diakui sebagai cara untuk mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses lelang melalui otomasi serta standarisasi prosedur tender (OECD, 2025). E-procurement juga memungkinkan peningkatan persaingan antara penyedia dengan membuka akses pasar yang lebih luas serta mengurangi peluang diskriminasi dalam pemberian kontrak (OECD, 2024). Di Indonesia, penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi penyedia lokal meskipun masih menghadapi kendala SDM dan infrastruktur digital (Suri & Dharmawan, 2023; Wicaksono *et al.*, 2025).

Namun, efektivitas SPSE dalam menghasilkan efisiensi anggaran yang merata masih menjadi tantangan, terutama di daerah otonom baru yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengalaman dalam manajemen pengadaan (Hidayatullah & Priyastiwati, 2025). Studi evaluatif di berbagai pemerintah daerah menemukan bahwa kendala utama implementasi e-procurement mencakup kurangnya kompetensi SDM, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan kualitas perencanaan pengadaan yang masih rendah (Henda *et al.*, 2025; Wicaksono *et al.*, 2025).

Berikut ini disajikan data ringkasan fenomena pengadaan elektronik di beberapa daerah Indonesia dalam kaitannya dengan efisiensi dan kendala implementasi:

**Tabel 1.** Fenomena Implementasi e-Procurement dan Efisiensi di Pemerintah Daerah Indonesia

Pemerintah Daerah	Implikasi e-Procurement	Efisiensi/Te muan	Tantan gan Utama	Sumber
Provinsi Bengkulu	Peningkatan efisiensi & partisipasi	Efisiensi anggaran & transparansi meningkat	Infrastruktur & regulasi	Suri & Dharmawan (2023)
Kabupaten Temanggung	Belum optimal	Kendala SDM & IT	SDM & fitur sistem	Hidayatullah & Priyastiwati (2025)
Kabupaten Ngawi	Transparansi belum maksimal	Belum sepenuhnya transparan	Standar transparansi	Wicaksono <i>et al.</i> (2025)
Kota Surabaya	Efisiensi proses lelang	Akses lebih luas penyedia	Efisiensi akses pasar	Juliana & Manggalou (2025)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

### Urgensi Penelitian

Walaupun e-procurement telah diterapkan secara luas, terdapat kesenjangan antara harapan teoritis mengenai efisiensi anggaran dan realitas implementasi di daerah, terutama di otonom baru yang memiliki kelembagaan yang masih berkembang. Penguatan pemantauan dan evaluasi, serta integrasi data SPSE dalam perencanaan anggaran belum optimal, sehingga tidak semua paket pengadaan menunjukkan efisiensi signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk mengukur sejauh mana SPSE mampu meningkatkan efisiensi anggaran dalam konteks kelembagaan daerah otonom baru dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendorongnya secara empiris.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan **masalah utama yang akan diteliti** sebagai berikut:

1. Sejauh mana penerapan SPSE berkontribusi terhadap efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa di daerah otonom baru?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui SPSE, termasuk peran pemantauan dan evaluasi?
3. Bagaimana hambatan implementasi SPSE dihadapi oleh unit pengadaan dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran?

## TINJAUAN LITERATUR

### Konsep E-Procurement dalam Tata Kelola Publik

Electronic procurement (*e-procurement*) merupakan bentuk inovasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diberlakukan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam belanja publik. E-procurement pada dasarnya merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan (*e-government*) yang memungkinkan proses tender dan kontrak dilakukan secara elektronik sehingga meminimalkan potensi manipulasi dan peningkatan daya saing penyedia (Nugraha & Kartini, 2025).

Literatur juga menegaskan bahwa e-procurement berperan tidak hanya sebagai alat teknologi, tetapi sebagai instrumen manajemen pemerintahan yang memperkuat prinsip *good governance*, termasuk dalam pencegahan praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan (Mazta, Gamayuni, & Prasetyo, 2025).

### Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan

Salah satu tujuan utama e-procurement adalah meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah dengan mempercepat proses pengadaan dan mengurangi biaya transaksi (Henda *et al.*, 2025). Studi di sektor publik Indonesia menunjukkan bahwa implementasi e-procurement terbukti berkorelasi dengan peningkatan *performance governance*, yakni transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender dan kontrak yang lebih terdokumentasi secara elektronik (Suardi, 2026).

Implementasi e-procurement juga memengaruhi kualitas laporan dan indikator kinerja, di mana alokasi anggaran yang direncanakan melalui sistem elektronik sering kali berkaitan positif dengan indikator kinerja pengadaan yang lebih kuat dibandingkan dengan

mekanisme manual (*non-e-procurement*) (Paembonan *et al.*, 2024; Tampang *et al.*, 2025; Suardi, 2026).

### Hambatan Implementasi dan Faktor Penentu Efektivitas

Meski potensinya banyak, literatur global dan lokal mencatat sejumlah tantangan signifikan dalam implementasi e-procurement. Tantangan ini meliputi aspek teknologi (mis. keamanan data, kesiapan sistem), organisasi (resistensi perubahan, kurangnya SDM terampil), serta konteks lingkungan yang inklusif terhadap regulasi dan partisipasi pelaku pasar (Mohungoo, Brown, & Kabanda, 2020).

Penelitian empiris di pemerintahan daerah Indonesia menemukan bahwa efektivitas e-procurement ditentukan oleh kombinasi faktor strategi, teknologi, organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan eksternal. Faktor-faktor ini berpengaruh bersama terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengadaan (*STOPE framework*) (Nani & Ali, 2025).

### Implikasi E-Procurement untuk Efisiensi Anggaran dan Kinerja Pemerintah

Beberapa studi khususnya pada konteks pemerintah provinsi dan daerah menunjukkan bahwa sistem e-procurement seperti SPSE dapat berdampak positif terhadap proses pengadaan mulai dari pengurangan waktu proses hingga peningkatan transparansi laporan (*procurement dashboards*) (Yeni *et al.*, 2025).

Lebih jauh lagi, literatur menyatakan bahwa e-procurement mampu memperkuat optimalisasi fungsi pemerintahan melalui peningkatan efisiensi keuangan, khususnya jika didukung oleh kerangka kebijakan yang kuat, kompetensi SDM, serta dukungan infrastruktur digital yang memadai (Mukhlis & Pranoto, 2025).

### Synthesis/Tinjauan Kritis

**Peran E-Procurement sebagai Reformasi Digital:** Konsensus literatur menunjukkan bahwa e-procurement bukan sekadar teknologi IT, tetapi juga bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan publik (Nugraha & Kartini, 2025; Mazta *et al.*, 2025).

**Efisiensi Anggaran:** Literatur empiris awal menunjukkan hubungan positif antara penggunaan e-procurement dan efisiensi anggaran, namun hasilnya belum universal karena

dipengaruhi oleh kesiapan institusi dan konteks lokal, khususnya dalam pemerintahan daerah (*local governments*) di Indonesia (Suardi, 2026; Henda *et al.*, 2025).

**Tantangan Implementasi:** Hambatan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur TI, dan resistensi organisasi merupakan persoalan mendasar yang sering muncul dalam studi implementasi e-procurement di banyak negara berkembang dan di Indonesia (Mohungoo *et al.*, 2020; Nani & Ali, 2025).

**Gap Penelitian:** Meskipun ada studi tentang dampak e-procurement terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan regional, masih terdapat kekurangan kajian *empirical quantitative* yang secara spesifik mengukur efisiensi anggaran pengadaan di daerah otonom baru—yang menjadi fokus penelitian Anda.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan kontribusinya terhadap efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi proses, konteks, dan dinamika kelembagaan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pengukuran kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018). Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pengadaan, hambatan implementasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berjalan di lingkungan organisasi publik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Papua Tengah. Mengingat sifat penelitian yang mendalam dan kontekstual, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman dalam pelaksanaan SPSE (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Sampel penelitian terdiri atas lima informan kunci yang berasal dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, yang mencakup pejabat struktural dan pelaksana teknis yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengadaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Lokasi ini dipilih karena Provinsi Papua Tengah merupakan daerah otonom baru, sehingga memberikan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji efektivitas SPSE dalam lingkungan kelembagaan yang masih berkembang. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu tahun 2024, menyesuaikan dengan siklus anggaran dan pelaksanaan pengadaan yang berjalan pada tahun tersebut.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami alur proses pengadaan dan penggunaan SPSE secara langsung. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait efisiensi anggaran, kendala implementasi, serta praktik pemantauan dan evaluasi pengadaan. Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen pengadaan, laporan realisasi anggaran, data SPSE, serta regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif interaktif dengan mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Data hasil wawancara dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskrip dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, implementasi SPSE, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan penarikan pola dan hubungan antar-temuan. Proses analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang konsisten dan didukung oleh bukti empiris yang memadai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, yang merupakan unit kerja strategis dalam penyelenggaraan pengadaan

barang dan jasa pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Tengah masih berada dalam fase penguatan kelembagaan, termasuk dalam tata kelola keuangan dan pengadaan publik. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah diwajibkan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai bagian dari kebijakan nasional digitalisasi pengadaan. Namun demikian, karakteristik organisasi yang relatif baru menyebabkan masih adanya keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta pengalaman operasional dalam memanfaatkan SPSE secara optimal untuk mencapai efisiensi anggaran.

**Karakteristik Responden**

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengalaman, posisi struktural, dan keterlibatan dalam penggunaan SPSE.

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Lama Bekerja	Keterlibatan dalam SPSE
I1	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	>10 tahun	Pengambil kebijakan & pengawasan
I2	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan	7-10 tahun	Koordinasi teknis pengadaan
I3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	5-7 tahun	Perencanaan & pelaksanaan kontrak
I4	Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan	3-5 tahun	Proses tender & evaluasi penawaran
I5	Staf Teknis Pengadaan	<3 tahun	Operasional SPSE & administrasi

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Karakteristik responden menunjukkan bahwa informan memiliki pengalaman dan peran yang relevan untuk memberikan informasi mendalam terkait efektivitas SPSE dan efisiensi anggaran pengadaan.

**Hasil Wawancara dan Analisis Tematik**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi, data dianalisis menggunakan **analisis tematik** untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, implementasi SPSE, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Proses analisis menghasilkan beberapa tema utama sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Tematik Implementasi SPSE dan Efisiensi Anggaran

Tema Utama	Subtema	Indikator Temuan	Kutipan Wawancara
Implementasi SPSE	Kepatuhan prosedural	Seluruh paket pengadaan wajib melalui SPSE	“Semua pengadaan sekarang wajib lewat SPSE, tidak ada lagi proses manual.” (I1)
Efisiensi Anggaran	Selisih HPS dan nilai kontrak	Efisiensi terjadi pada sebagian paket pengadaan	“Ada paket yang nilai kontraknya lebih rendah dari HPS, tapi tidak semua.” (I3)
Transparansi	Akses informasi tender	Proses lebih terbuka dan terdokumentasi	“Informasi lelang bisa diakses publik, jadi lebih transparan.” (I2)
Hambatan SDM	Kompetensi teknis	Keterbatasan pemahaman fitur SPSE	“Tidak semua staf paham fitur SPSE secara mendalam.” (I5)
Infrastruktur TI	Koneksi dan sistem	Gangguan jaringan memperlambat proses	“Kalau jaringan bermasalah, proses bisa tertunda.” (I4)
Monitoring & Evaluasi	Pemanfaatan data SPSE	Data belum optimal untuk	“Data SPSE belum

Tema Utama	Subtema	Indikator Temuan	Kutipan Wawancara
		evaluasi kinerja	sepenuhnya dipakai untuk evaluasi efisiensi.” (11)

Sumber: Data hasil wawancara (2025)

### Pembahasan Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **penerapan SPSE di Provinsi Papua Tengah telah berjalan secara prosedural dan sesuai regulasi**, namun kontribusinya terhadap efisiensi anggaran belum optimal dan belum merata. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama, yang menunjukkan bahwa SPSE mampu menghasilkan efisiensi anggaran pada sebagian paket pengadaan, terutama yang memiliki tingkat persaingan penyedia lebih tinggi. Efisiensi tersebut tercermin dari adanya selisih antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai kontrak, sebagaimana juga ditemukan dalam studi e-procurement di pemerintah daerah lain.

Namun demikian, temuan ini menguatkan literatur yang menyatakan bahwa **keberadaan sistem elektronik saja tidak otomatis menjamin efisiensi anggaran**. Faktor-faktor organisasi dan kelembagaan memiliki peran yang sangat menentukan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan fitur lanjutan SPSE dan analisis data pengadaan, menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan manfaat sistem.

Rumusan masalah kedua terkait faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pengadaan juga terjawab melalui temuan bahwa kualitas perencanaan pengadaan, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta efektivitas pemantauan dan evaluasi memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian efisiensi. Monitoring dan evaluasi pengadaan di Provinsi Papua Tengah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja dan analisis data SPSE, sehingga peluang perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) belum dimanfaatkan secara optimal.

Temuan ini sekaligus menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bahwa hambatan implementasi SPSE tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek manajerial dan

kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, serta optimalisasi pemanfaatan data SPSE untuk evaluasi kinerja menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa di daerah otonom baru.

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPSE telah berjalan sesuai ketentuan dan berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, serta menghasilkan efisiensi anggaran pada sebagian paket pengadaan.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui SPSE belum bersifat optimal dan merata. Efektivitas SPSE sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, terutama kualitas perencanaan pengadaan, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta pemanfaatan data SPSE dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor penentu efisiensi pengadaan telah tercapai dan menegaskan bahwa keberhasilan e-procurement tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi semata.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat perspektif tata kelola publik dan e-government yang menyatakan bahwa inovasi digital dalam sektor publik harus diiringi dengan kesiapan organisasi dan kapasitas institusional agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Temuan ini juga menambah bukti empiris bahwa hubungan antara e-procurement dan efisiensi anggaran bersifat kontekstual, khususnya dalam lingkungan pemerintahan daerah yang masih berada pada tahap konsolidasi kelembagaan.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural dalam penerapan SPSE, tetapi juga pada penguatan kompetensi aparatur, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, serta optimalisasi penggunaan data SPSE sebagai dasar evaluasi

kinerja dan pengambilan keputusan. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi kunci dalam mendorong efisiensi anggaran yang berkelanjutan.

### Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah informan dan fokus pada satu pemerintah daerah sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini belum mengukur tingkat efisiensi anggaran secara kuantitatif dan belum membandingkan kinerja pengadaan sebelum dan sesudah penerapan SPSE. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), melibatkan lebih banyak daerah sebagai objek penelitian, serta mengintegrasikan analisis data keuangan dan data SPSE secara longitudinal untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak e-procurement terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Henda, R., Susetyo, D., Saftiana, Y., Yusrianti, H., & Kalsum, U. (2025). Implementation of government e-procurement in Indonesia: A systematic literature review. In *Proceedings of the International Seminar on Business, Economics, Social Science, and Technology (ISBEST)*. Universitas Terbuka.
- Hidayatullah, A., & Priyastiwati, D. A. (2025). Implementasi e-procurement pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi*, 9(1), 45–58.
- Juliana, J., & Manggalou, S. A. (2025). Electronic procurement and market access efficiency in local government procurement. *Future Journal of Management and Business*, 4(2), 101–112.
- Mazta, M. T., Gamayuni, R. R., & Prasetyo, T. J. (2025). E-procurement as a pillar of good governance: A literature review on fraud prevention in the public sector. *Research of Economics and Business (ROE)*, 2(1), 15–27.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mohungoo, I., Brown, I., & Kabanda, S. (2020). A systematic review of implementation challenges in public e-procurement. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 86(3), e12114. <https://doi.org/10.1002/isd2.12114>
- Mukhlis, M., & Pranoto, S. (2025). Digital governance and public procurement efficiency in local governments. *Aristo: Social, Political, and Humaniora Journal*, 13(1), 89–104.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2025). Determinants of effective e-procurement systems in Indonesian local governments: An STOPE framework approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jdab.v12i1.15671>
- Nugraha, D., & Kartini, D. S. (2025). Bibliometric analysis of e-procurement research as part of e-government implementation. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 145–158.
- OECD. (2024). *Public procurement for innovation: Good practices and strategies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5e0e6c9f-en>
- OECD. (2025). *Enhancing public procurement efficiency in the digital era*. OECD Publishing.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Suardi, I. (2026). Technology acceptance model on e-procurement toward procurement governance in Indonesia. *Journal of Research in Social Science, Economics, and Management*, 5(1), 23–37.
- Suri, A., & Dharmawan, A. (2023). Efektivitas e-procurement dalam meningkatkan efisiensi

- pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 12(2), 211–223.
- Tampang, G. I., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pemanfaatan SIRUP terhadap Transparansi Pengadaan di Kabupaten Yahukimo Pendahuluan. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 1–11.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/977>
- Wicaksono, A., Pramono, S., & Lestari, R. (2025). Transparency issues in local government e-procurement implementation. *Journal of Accounting, Control, and Information Technology*, 3(1), 55–67.
- Yeni, M. T., Atawurur, P. O., & Teturan, Y. E. (2025). E-procurement implementation and its impact on government performance in South Papua Province. *International Journal of Research and Review*, 12(7), 78–86.